

KEBEBASAN WARTAWAN DALAM INDUSTRI PERS NASIONAL*

Oleh Ashadi Siregar

(1)

Biasanya yang populer untuk dibicarakan adalah mengenai kebebasan pers. Ini menyangkut posisi institusional pers dalam masyarakat. Kalau saat ini dengan bersengaja dibahas kebebasan wartawan, pemikirannya muncul dari situasi yang berlangsung dalam dunia Pers Nasional kita sekarang. Kemajuan fisik-materil (padat modal dan teknologi) dalam dunia pers membawa konsekuensi terhadap pola-pola kerja yang semakin ketat diatur oleh standar manajemen. Maka modal dan teknologi tinggi yang berada dalam latar manajemen ini lebih jauh telah ikut mempengaruhi kerja profesional wartawan. Wartawan yang semula menjadi primadona dalam pers, perlu menyadari bahwa kaumnya sudah menjadi salah satu komponen dalam gerak manajemen. Wartawan dengan jurnalisme yang dijalankannya, sebagai salah satu komponen, sama pentingnya dengan komponen lainnya.

Kegiatan dalam media pers, dengan menggunakan bahasa manajemen, dirumuskan dalam sebutan pra-produksi, produksi, dan pemasaran. Sebutan ini berkonotasi fisik-materil dan berkonteks ekonomi. Sedang kerja jurnalisme sejatinya adalah proses intelektual. Kegiatan jurnalisme pada dasarnya adalah memilih realitas sosial untuk dijadikan informasi pers, untuk kemudian informasi ditransfer ke alam pikiran khalayak luas. Proses mengubah realitas sosial menjadi informasi itu sendiri adalah kerja intelektual, begitu pula penyerapan informasi yang dilakukan oleh khalayak adalah kerja intelektual.

Kerja jurnalisme yang berada dalam situasi industrial tentulah akan menyesuaikan diri dengan manajemen. Tetapi selain diformat oleh manajemen industrial, kerja wartawan juga dipengaruhi oleh etos profesional jurnalismenya masing-masing. Ethos profesional ini menuntut adanya kebebasan dalam bekerja. Profesionalisme ditandai oleh kemandirian, sementara kemandirian itu harus ditempatkan dalam proses manajemen. Inilah masalah yang perlu diperhatikan. Jadi bukan sekadar kebebasan wartawan, sebab kebebasan hanya bermakna bagi profesionalisme. Masalahnya menjadi dua hal, bagaimana memenuhi standar profesional, dan bagaimana menempatkannya di dalam manajemen pers. Masalah pertama ini masih tetap menjadi keprihatinan bersama pengelola media pers. Sedang masalah kedua baru menjadi signifikan jika masalah pertama sudah terjawab. Kalau tidak, pembicaraan tentang posisi wartawan dalam manajemen hanya membuang waktu.

Kalau sekarang pembicaraan difokuskan kepada kebebasan wartawan, tak lain karena kebebasan sering dianggap sebagai kata kunci dalam profesi jurnalisme. Sementara etos profesi merupakan sisi lainnya lagi, sebagai nilai-nilai yang menjadi acuan dan motivasi bertindak dalam kerja profesional. Karenanya kebebasan macam apa yang dipunyai oleh wartawan, dapat dilihat melalui etos macam apa yang mendasari kerja profesinya. Dalam kaitan inilah akan dilihat keberadaan wartawan dalam Pers Nasional kita yang semakin nyata bersifat industrial.

(2)

* Orasi disampaikan pada ACARA WISUDA SARJANA, Sekolah Tinggi Komunikasi Massa AWS, Surabaya 25 Juli 1991

Sosok Pers Nasional sekarang dan prospeknya dapat dilihat melalui pandangan kesejarahan, yaitu sebagai lanjutan dari Pers Nasional pada masa kolonial. Jika setting kolonial dipakai untuk membicarakan kehidupan pers, setidaknya dapat dibedakan 3 tipe, yaitu pers kolonial sebagai pendukung establisment politik, pers komersial yang umumnya dikelola oleh kelompok Cina, dan pers perjuangan yang diterbitkan sebagai bagian Pergerakan Nasional. Pers perjuangan inilah yang disebut sebagai Pers Nasional. Ethos kehadirannya dapat dibedakan secara tajam dengan kedua tipe pers lainnya. Pada pers perjuangan, dengan sendirinya jurnalisme menjadi primadona. Media dimulai dengan sejumlah personel jurnalistik yang kebanyakan mengusahakan sendiri biaya penerbitan. Posisi semacam ini tidak akan ditemukan lagi pada pers sekarang.

Dengan demikian saat ini tidak mungkin membuat taksonomi tipe pers atas dasar perbedaan etos kehadirannya. Semua pers yang terbit di Indonesia disebut Pers Nasional, baik pers yang lingkup informasi dan jaringan distribusinya nasional maupun lokal, ataupun isinya sekadar paha dan dada perempuan dan kode atau ramalan nomor buntut. Pada saat calon pengelola media pers mengurus SIUPP, seluruh prosedur yang dijalankan oleh pemerintah tentulah untuk menyaring agar hanya penerbitan pers yang bertolak dari etos Pancasila diberi lisensi terbit yang sangat berharga itu. Pastilah lewat SIUPP, pemerintah berniat membangun pers nasional yang sehat dan bertanggung-jawab sosial, bukan sekadar pers yang menjadikan paha dan dada wanita dan impian ramalan buntut sebagai komoditi.

Dalam perkembangannya, Pers Nasional bergerak ke arah penerbitan yang bersifat industrial. Ini ditandai dengan sifatnya yang padat modal dan kemajuan perangkat keras serta pola manajemen yang semakin canggih. Di tambah lagi dengan sifat perusahaan yang padat modal, sosok pers sekarang sangat berbeda dibanding dengan Pers Nasional pada masa Pergerakan Nasional. Karenanya mungkin kurang tepat men"tracee" menelusuri jejak pers sekarang dengan Pers Nasional tempo "doeloe" di jaman pergerakan.

Pers Nasional masa depan, yang akan mengisi era Pembangunan Nasional tahap ke dua, boleh saja dipertalikan dengan etos pers perjuangan. Tetapi mungkin perlu disadari bahwa etos yang menggerakkan jurnalisme saat itu sehingga memunculkan format pers perjuangan, kalau mau dijalankan sekarang, boleh jadi akan melahirkan format yang sangat berbeda. Etos bisa dirumuskan sebagai idealisasi kehidupan, dan idealisasi bisa berbeda dengan dinamika realitas empiris. Banyak variabel yang perlu diperhitungkan dalam proses idealisasi ke realitas empiris.

Pertama-tama yang perlu diingat adalah motivasi kemunculan pers perjuangan, yaitu ide politik. Dengan demikian pers merupakan bagian institusi politik. Pers adalah bagian organik dari suatu dinamika sosial yang menjadi institusi bersifat opponent di dalam struktur sosial saat itu. Dengan motivasi politik yang bersifat opponent, sudah barang tentu posisi dari pengelola dalam membangun etos jurnalismenya akan bersifat khas. Dengan menempatkan pers sebagai alat politik dengan sendirinya membawa konsekuensi terhadap keberadaan para jurnalisnya, yaitu dengan melihatnya sebagai aktivis politik, atau sebaliknya, aktivis politik menjalankan kegiatan jurnalistik. Artinya jurnalis dan aktivis politik merupakan 2 sisi dari mata uang logam. Pers partisan menjadikan wartawan sebagai pejuang, sehingga fasilitas kehidupan yang terbatas pun dianggap wajar. Dengan etos pers perjuangan itu, kendati sarjana misalnya, tetapi dengan posisi sebagai pejuang, kehidupan materilnya berbeda dengan yang bekerja sebagai ambtenaar pemerintah Hindia Belanda dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah. Apakah etos semacam itu masih mau dihidup-hidupkan sekarang?

Ketika kalangan pers nasional mendirikan organisasi profesi kewartawanan tidak berapa lama setelah Indonesia merdeka, upaya menegakkan profesi ditandai dengan dirumuskannya kode profesi. Dilihat dari isinya, banyak kemiripannya dengan kode etik jurnalistik (Cannon of Journalism) di Amerika Serikat. Meskipun kode etik ini tidak selaras dengan pola jurnalisisme yang dijalankan oleh pers nasional pada masa awal republik. Azas "fair" dan obyektif misalnya, bagaimana bisa dijalankan dalam menghadapi tentara pendudukan Belanda? Sebagai ilustrasi, untuk menulis Belanda saja misalnya, harus dengan b kecil, belanda. Jurnalisisme emosional ini tentulah belum memerlukan kode etik yang mengadaptasi kode profesi jurnalisisme Barat. Walaupun ketika itu kita diuntungkan oleh kode jurnalisisme yang berimbang dan obyektif dari pers Barat, sehingga realitas perjuangan nasional bisa bergaung ke dunia internasional.

Kalau mau jujur, pers perjuangan yang sering disebut-sebut itu sebenarnya jurnalisisme pamflet politik. Tentunya tidak akan ada yang mengambil posisi seperti itu dalam sistem nasional sekarang. Meneruskan etos perjuangan semacam itu secara mentah sekarang, mungkin dapat dilakukan dengan menghadirkan jurnalisisme pamflet pembangunan. Umumnya tindakan pejabat birokrasi dianggap identik sebagai kegiatan pembangunan. Maka gaya jurnalisisme broadcasting TV jam 17.00 dan 19.00 boleh jadi dapat dijadikan contoh berita ala pamflet pembangunan. Media cetak yang lebih banyak merefer informasi pers dari pejabat birokrasi bukan dari realitas sosial yang berasal dari kehidupan masyarakat, akan menghasilkan jurnalisisme pamflet pembangunan juga. Ini identik dengan pers perjuangan yang menjadikan isi pokok media berupa gagasan-gagasan yang diceramahkan atau dipidatoken oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional.

Kendati isi pers perjuangan merupakan pamflet politik, setidaknya ada juga dukungan khalayak pembaca. Dukungan ini bersifat emosional, datang dari masyarakat yang memiliki kesamaan ide dengan pengelola media. Memang tidak bisa meraih sukses komersial sebagaimana pers golongan Cina, sehingga pengelola pers perjuangan sering mengalami kebangkrutan. Jumlah pelanggan terbatas, sesuai dengan kemampuan ekonomi kelompok pribumi, dan lebih terbatas lagi yang berani secara terang-terangan bersimpati kepada gerakan nasional. Berlangganan pers perjuangan menjadi indikator bagi dukungan terhadap perjuangan nasional yang opponent terhadap pihak yang berkuasa. Begitulah, dengan jatuh bangun, pers perjuangan tetap dihidupi oleh sejumlah kecil khalayak pembaca yang setia.

Menerapkan pola pers perjuangan di masa sekarang, berarti bunuh diri. Semangat opponent dalam sistem nasional RI, sangat tidak relevan. Bukan hanya ancaman pembatalan SIUPP yang akan dihadapi, tetapi yang mendasar adalah tidak mungkin diperoleh basis dukungan khalayak media. Nasibnya bisa sama halnya dengan media pamflet pembangunan, dengan gampang diabaikan jika khalayak memiliki alternatif media. Siaran berita birokrasi dari TVRI akan ditinggalkan khalayak yang memiliki parabola sehingga dapat menangkap saluran stasiun luar negeri. Kita tidak bisa lagi mengharapkan loyalitas bersifat emosional terhadap media dalam suasana normal. Motivasi terhadap informasi media bersifat otonom, sepenuhnya ditentukan secara individual oleh khalayak.

Berita birokrasi ala TVRI memang ada peminatnya, yaitu para pejabat yang kegiatannya kemungkinan akan disiarkan. Ini hal yang wajar, sebab setiap orang ingin "menonton" dirinya. Lingkup dari "diri" ini bisa bersifat sendiri, keluarga, kampung, klan, atau dunia yang sangat dikenal oleh si khalayak. Kalau dunia birokrasi menjadi bagian kehidupan diri khalayak, informasinya akan memiliki daya tarik. Karenanya perhatian khalayak terhadap siaran berita TVRI jam 17.00 dan 19.00 dapat dijadikan indikator posisi birokrasi dalam peta penghayatan masyarakat.

(4)

Keberadaan pers sebagai institusi sosial ditandai sifat otonomnya yang ditentukan oleh interaksi dengan lingkungan. Dengan kata lain, otonomi pers lahir dari resultante yang berasal dari idealisme pengelola dengan tuntutan/ekspektasi (expectation) institusi lain dalam sistem sosial. Tetapi perlu diingat bahwa hubungan dengan institusi lain ini adalah interaksi yang setara, tidak bersifat hegemonik.

Ekspektasi yang paling utama adalah motivasi dari khalayak pembaca yang berada dalam berbagai institusi dalam sistem sosial. Motivasi khalayak ini menjadi dasar dalam kehadiran media pers. Idealisme yang dianut oleh pengelola media dapat berupa rumusan yang berasal dari ekspektasi khalayak. Jika khalayak bertujuan mendapatkan informasi untuk memenuhi motivasi hiburan maka idealisme pengelola adalah sebagai penghibur. Sedang khalayak yang memiliki ekspektasi untuk mendapat informasi yang bersifat informasional (menjadikannya "well-informed"), akan melahirkan idealisme yang bersifat informatoris. Sebaliknya jika idealisme pengelola dirumuskan berbeda dari ekspektasi khalayak, katakanlah semacam media bersifat misionaris, pengelola media bermaksud mem"format" khalayak agar sesuai dengan idealisme tersebut.

Pilihan dalam hubungan idealisme dan ekspektasi inilah yang menjadi dasar politik keredaksian dalam pengwujudan produk media. Kejelasan akan orientasi media akan dicapai melalui rumusan yang jelas akan politik keredaksian, dan dari sinilah sebenarnya bertolak seluruh dinamik penerbitan. Maka posisi jurnalisme sebagai primadona akan digantikan oleh manajemen keredaksian (editorial management) sehingga dapat menjadi subsistem dalam sistem manajemen penerbitan. Bahasa manajemen yang diterapkan dalam kegiatan keredaksian bukan berarti mengurangi makna jurnalisme, tetapi menuntut wartawan sehingga perlu merumuskan setiap langkah kerja dalam kaitan dengan seluruh sistem media.

Pers di masa depan menempatkan sistem manajemen sebagai kata kunci, yang di dalamnya perlu ditentukan entitas yang menjadi sub-sistem. Setiap entitas merupakan satuan kegiatan yang dapat dianalisis pada tingkat perencanaan, eksekusi dan pengawasan sehingga masing-masing sub-sistem memiliki kesesuaian dengan seluruh sistem media. Setiap entitas ini biasa dijadikan titik tolak dalam pengawasan mutu terpadu (total quality control) karena kejelasan proses dan output-nya.

Dalam manajemen penerbitan ini, tidak ada entitas yang menjadi primadona. Entitas keredaksian yang pada masa perjuangan nasional punya etos yang khas, perlu menyadari bahwa posisinya tidaklah lebih penting dibanding dengan entitas marketing dan produksi misalnya. Di dalam entitas keredaksian sendiri juga masih ada unit-unit yang dapat diidentifikasi sebagai sub-sub-sistem, sebagaimana dalam entitas marketing juga ada sub-sub-sistem yang kesemuanya sama pentingnya dalam dinamik manajemen.

Jurnalisme dapat "dimakan" oleh manajemen jika para wartawan tidak menempatkan secara proporsional entitas keredaksian sebagai sub-sistem dalam sistem keseluruhan. Atau ketegangan antara wartawan dan manajemen, jika wartawan masih tetap bermimpi jurnalisme sebagai primadona dunia penerbitan. Dengan demikian tantangan profesionalisme wartawan di masa depan bukan hanya mengembangkan teknik jurnalisme pada tingkat bagaimana (how) untuk menformat realitas menjadi informasi, tetapi lebih jauh menempatkan outputnya dalam keseluruhan sistem manajemen penerbitan pers.

(5)

Pers nasional, dalam hal ini media cetak di masa depan bukan hanya menghadapi tantangan di dalam dirinya sendiri, tetapi lebih-lebih lagi perkembangan masyarakat Indonesia. Media cetak berkembang dalam masyarakat industrial. Sebagai catatan perlu diingat bahwa masyarakat industrial adalah tipe masyarakat yang berkembang setelah meninggalkan dunia agraris tetapi belum memasuki tahapan masyarakat informasi.

Posisi media cetak di negeri kita dapat disebut serba tidak tepat tempat. Media cetak muncul ketika bagian terbesar masyarakat belum beranjak dari alam agrarisnya. Dalam alam ini, bukan media massa cetak yang diperlukan, sebab masyarakat dapat tercukupi dengan media sosial. Sebelum menjadi masyarakat industrial yang mengandalkan media massa, masyarakat kita akan dilanda oleh arus teknologi komunikasi dengan media interaktif. Dari media sosial ke media interaktif memang suatu loncatan teknologi yang luar biasa, tetapi substansinya sebenarnya tidak banyak berbeda. Media sosial juga bersifat interaktif, setiap pelaku komunikasi dapat menentukan sendiri kapan, dan berapa banyak informasi akan diambilnya. Sedang media massa yang bersifat searah dengan posisi pengelola lebih bersifat hegemonik, dapat ditinggalkan oleh khalayak jika tidak bersekesuaian dengan motivasinya.

Sejumlah elit di kota-kota sudah memasuki alam masyarakat informasi. Kebutuhan akan informasi yang bersifat pragmatis dipenuhi melalui media interaktif yang memiliki jaringan internasional. Sejumlah lainnya lebih banyak menggunakan media massa elektronik bersifat audio-visual, dengan parabola jam siaran sepanjang waktu. Pola penggunaan media audio-visual bersifat menangkap seluruh perhatian, berbeda dengan media audio yang masih bisa dikerjakan sambil lalu. Maka kesempatan untuk menggunakan media massa cetak semakin terbatas.

Bagian terbesar masyarakat, meloncat ke media massa elektronik audio-visual. Cakupan siaran televisi baik pemerintah maupun swasta semakin luas. Sehingga masyarakat yang semula lebih banyak menggunakan media sosial, meskipun pendidikan relatif meningkat, dan pola-pola kerja berubah, tidak sempat terbiasakan menggunakan media cetak. Contoh yang paling khas agaknya dengan siaran pagi televisi, dengan begitu jam membaca media cetak edisi pagi akan berkurang. Loncatan budaya komunikasi yang dialami oleh masyarakat kita, dengan sendirinya tidak menguntungkan bagi perkembangan media cetak.

(6)

Perubahan masyarakat menuntut pengelola media cetak tidak lagi sekadar mempertanyakan etos keberadaannya yang mengacu kepada mithos-mithos perjuangan, tetapi juga mencari celah untuk dapat hidup dan berkembang. Jelas kompetisi antar media berlangsung kian keras. Bukan hanya antar media cetak sejenis (satu surat kabar harian dengan surat kabar harian lainnya), tetapi persaingan merebut perhatian khalayak yang waktunya digunakan untuk media lainnya. Setiap kali seseorang menggunakan suatu media, perlu diperhitungkan bahwa pada waktu yang sama dia tidak mungkin menggunakan media lain. Kecuali mungkin media audio, sedang media lainnya bersifat absolut dalam waktu penggunaannya. Meskipun seseorang mampu membeli sebanyak-banyaknya surat kabar misalnya, dia akan tetap dibatasi oleh waktu dalam penggunaannya.

Sekarang dan di masa depan, titik tolak dalam menerbitkan media pers adalah modal. Realitas empiris menuntut begitu, dan juga ketentuan untuk mendapat lisensi usaha penerbitan pers menyebutkan modal sebagai persyaratan utama. Bukan personel jurnalistik sebagai sumberdaya yang menjadi persyaratan untuk memulai usaha penerbitan pers. Karenanya etos perjuangan cukup dijadikan acuan pribadi, sebab tidak menjadi dasar dalam sistem manajemen organisasi pers.

Dalam kecenderungan permodalan, tentulah entitas keredaksian perlu meningkatkan profesionalisme yang pas dengan sistem yang ada. Kalau tidak mau dimakan, maka tidak

terelakkan untuk menjadi "jurnalis plus", yaitu yang memiliki keterampilan teknis yang standar dalam jurnalisme, juga memiliki wawasan untuk menempatkan jurnalisme tersebut dalam setting manajemen.

Dengan demikian politik keredaksian yang menjadi dasar bagi kegiatan yang berkaitan dengan muatan produk, menjadi lebih complicated. Tidak mungkin lagi media pers diproduksi hanya dengan mitos-mitos, termasuk mitos tentang orang atau pun trade mark media yang sudah mapan. Setiap pengelola perlu merumuskan editorial mix dan formula sebelum memproduksi. Dengan rumusan inilah strategi marketing yang bersifat global dapat dikembangkan. Jika kaum jurnalis siap dengan titik tolak semacam ini, dapat disebut bahwa entitas keredaksian yang menjalankan jurnalisme setidaknya dapat menjadi bagian esensial dalam sistem manajemen. Inilah jawaban bagi tantangan pers industrial di masa depan.

(7)

Kebebasan wartawan dalam pers industrial dapat dikembangkan dalam landasan yang dibangun melalui standar profesional yang dapat ditempatkan dalam setting manajemen. Dengan kata lain, kaum wartawan setiap media harus merumuskan lebih tentang pers macam apa yang akan diwujudkan, sehingga manajemen sejak awal dapat memproyeksikan produk macam apa yang akan diproduksi dan dipasarkan itu. Dalam posisi ini tawar-menawar dengan manajemen dapat dilakukan pada tahap dini, sehingga dalam proses kerjanya, komponen kewartawanan dapat otonom. Melalui otonomi ini komponen kewartawanan ditantang untuk mewujudkan persnya, yang dapat dipasarkan oleh manajemen.

Ethos profesi yang dapat ditempatkan dalam setting manajemen tentulah tidak bersifat opponent terhadap struktur sosial. Sebab keberadaan pers industrial di dalam struktur sosial adalah sebagai pendukung establisme. Dengan demikian pers nasional digerakkan oleh etos profesi yang paling mendasar, yaitu secara otonom memproses realitas sosial menjadi informasi. Masalah ini kedengarannya gampang, tetapi masalah otonomi dan kerja jurnalisme itu sesungguhnya menyangkut berbagai faktor yang menjadi dasar dalam proses penyiapan tenaga profesional jurnalisme. Ini perkara besar dalam dunia pendidikan jurnalisme kita.
